

Isu-Isu Strategis dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo

Andi Samsu Alam (Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Andi Mamu (Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo)
Email: alamandi@rocketmail.com

Abstract

This study aims to identify and analyze the strategic issues that arise in governance, rural development, fostering community, and community empowerment in addition to analyzing the implementation of the strategic issues in governance, rural development, fostering social and community development in the District Pitumpanua Wajo. The results showed that the issues that arise from RPJMDesa strategis, musrembang as well as priority issues by the community found a number of problems that the village inadequate infrastructures, especially rural roads, village information, sports infrastructure, and skills training for the community.

Keywords: *strategic issues, development, rural*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis isu-isu strategis yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat selain itu untuk menganalisis pelaksanaan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten wajo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Isu-isu strategis yang muncul dari RPJMDesa, musrembang serta prioritas isu yang bersumber dari masyarakat ditemukan sejumlah permasalahan yaitu infrakstruktur desa yang kurang memadai khususnya pembangunan jalan pedesaan, informasi desa, sarana prasarana olahraga, dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat.

Kata kunci: *isu strategis, pembangunan, desa*

PENDAHULUAN

Arah dan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sejalan dengan hadirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendeskripsikan tentang desentralisasi yang merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan sasaran utama berdasarkan landasan yang telah ditetapkan dan dilaksana-

kan demi mencapai tujuan sehingga masyarakat desa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pada kenyataannya tujuan pembangunan dapat tercapai apabila dimulai dari jajaran terendah yaitu pembangunan di tingkat desa (Sunarno, 2008).

Penyerapan isu-isu di desa memperhatikan prioritas kebutuhan desa, prioritas pembangunan desa dan prioritas kegiatan desa. Bila dikaitkan dengan lingkup pembangunan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014 yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi, peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desaberdasarkan kebutuhan masyarakat desa (Pristiyanto, 2015).

Masyarakat sebagai objek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini perlu ikut masyarakat dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisinya. Seberapa kerasnya usaha pemerintah membangun jika tidak melibatkan serta menumbuhkan partisipasi masyarakat serta tidak didukung oleh masyarakat maka tingkat keberhasilan pembangunan dan kelanjutan suatu program pembangunan akan berbeda kondisinya jika masyarakat berpartisipasi (Sunarti, 2012).

Isu-isu terkait pembangunan desa muncul mulai dari dusun/RW dibawa kedalam Musrenbang Desa sehingga dapat terakomodasi dalam pelaksanaan pembangunan. Isu-isu dalam rencana pembangunan desa yang nanti diolah dalam Musrenbang Desa semestinya murni datang dari aspirasi masyarakat desa itu sendiri. Sehingga dalam regulasi/kebijaksanaan pelaksanaan Musrenbang Desa dapat menjadikan isu-isu yang datang dari masyarakat menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan desa. Isu-isu dalam musrenbang Desa tersebut merupakan masukan yang selaras dengan Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa,

arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perencanaan Pembangunan daerah melalui Musrenbang merupakan sarana untuk menumbuhkembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Bottom Up Planning) yang secara mekanisme dan fungsional dengan kegiatan merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah, menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu dan menumbuhkan kondisi dinamis antara masyarakat (Supadmi, 2013). Berbagai usulan atau masukan yang diformulasikan pada Musrenbang Desa/Kelurahan, kemudian di bawa ke Musrenbang Kecamatan untuk dibicarakan bersama oleh para perwakilan dari sejumlah desa/ kelurahan. Selanjutnya, hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan di bawa ke Musrenbang Tingkat Kabupaten /Kota yang melibatkan para stakeholder baik birokrat desa/ kelurahan, kecamatan, birokrat SPKD maupun legislator serta masyarakat. Demikian seterusnya di bawah ke Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Tingkat Nasional serta program-program Kementerian terkait (Acmad, 2014).

Berdasarkan keempat bidang yang diprioritaskan dalam pembangunan desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu kiranya peneliti untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan desa yang ada di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten. Berdasarkan observasi peneliti masalah pembangunan fisik dan sosial diantaranya rendahnya tingkat pendidikan, minimnya sarana dan prasarana transportasi, prasarana dan sarana pendidikan yang kurang mema-

dai, terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya kesadaran petani terhadap adopsi inovasi pertanian masih mewarna isu-isu yang muncul diberbagai desa di Kecamatan Pintumpanua Kabupaten Wajo.

Hal lain yang menjadi urgensi dalam penelitian ini adalah belum ditemukan adanya metode yang digunakan untuk menentukan prioritas pembangunan yang diidentifikasi melalui isu-isu strategis dalam pembangunan desa selain itu penelitian juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Pintumpanua Kabupaten Wajo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi pada Kecamatan Pintumpanua Kabupaten Wajo. Pendekatan penelitian ini menggunakan model kombinasi (Creswell, 2010) yaitu kualitatif-kuantitatif (Mix Method). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Peneliti mengambil lima desa sebagai sampel yaitu Desa Kaluku, Desa Lauwa, Desa Lompo Bulo, Desa Tanrongi, dan Desa Tellesang dengan alasan bahwa Desa tersebut merupakan hasil pemekaran dari desa induk sehingga menarik untuk melihat isu-isu strategis yang sedang berkembang. Kuesioner penelitian menggunakan format *scale response question* dan format *kuesioner close response question*.

Penelitian ini melibatkan 76 Responden. Peneliti menggunakan teknik simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi itu. Sementara informan terdiri dari kepala Desa dan Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa serta tokoh masyarakat pemerhati pembangunan desa.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan sesuai dengan obyek yang diteliti. Kuesioner yang dibagikan kepada responden, wawancara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dokumentasi dengan kajian literatur/kepuustakaan, dokumen, dan sumber tertulis lainnya yang memiliki kaitan dengan kebutuhan data dan informasi pada penelitian ini.

Dalam mixed methods research, teknik analisis data yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada tipe/desain metode yang digunakan. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan jenis data, pendekatan, dan tipe, dan kebutuhan/kesesuaian dengan penelitian maka dalam penelitian ini pendekatan kualitatif sebagai yang utama/primer dengan kuantitatif sebagai penunjang/sekunder. Kemudian dukungan data kuantitatif dilakukan dengan pemberian skor rata-rata dengan penafsiran < 2 berarti rendah, 2-3 berarti sedang dan > 3 berarti tinggi. Selanjutnya analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Rangkaian prosesnya mencakup reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dalam pembangunan desa di Kecamatan Pintumpanua maka akan dipaparkan melalui aspek berikut ini.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa

Penelusuran dokumen menunjukkan sejumlah kegiatan yang menjadi agenda Desa dalam RPJM Desa yang terdapat pada tiga Desa yaitu Lauwa, Tellesang dan Tanrongi. Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Dokumen RPJM Desa tersebut dideskripsikan

sejumlah isu-isu strategis yang sifatnya mendesak terkait sarana prasarana pembangunan desa meliputi infrastruktur kesehatan pendidikan, dan social kemasyarakatan yang menjadi isu-isu yang dituangkan dalam RPJM Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa RPJM Desa memberikan gambaran tentang permasalahan yang ada di Desa sehingga dapat dijadikan sebuah gambaran tentang isu strategis dalam pembangunan desa di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo isu-isu yang muncul secara umum masih terkait dengan persolaan infrastruktur Desa seperti di Desa Walua, Tallesang dan Tanrongi yang masih membutuhkan perhatian pada jalan Desa. Sarana pendidikan dan kesehatan, sarana kemasyarakatan masih menjadi isu yang juga perlu mendapat perhatian serta keamanan desa masih perlu mendapatkan perhatian.

Musyawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Dari penelusuran dokumen dapat diketahui bahwa bidang fisik dan sarana mendapat porsi yang lebih dalam isu-isu strategis yang muncul dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo yakni peningkatan sarana transportasi, terpenuhinya kebutuhan air petani, peningkatan sarana Pendidikan, kesehatan dan produksi pertanian menjadi isu yang paling sering muncul dalam musrenbang desa di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diperoleh gambaran bahwa terdapat banyak usulan yang masuk dalam musrenbang yang dapat diidentifikasi sebagai isu strategis namun hal tersebut bersifat variatif sebagian besar isu yang muncul dimusrenbang terealisasi dan sebagian belum terealisasi. Dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam musrenbang sangat aktif dan isu strategis

yang paling sering muncul adalah terkait dengan infrastruktur khususnya jalan tani di Desa yang memerlukan peningkatan perbaikan jalan.

Identifikasi isu-isu strategis yang bersumber dari masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sarana prasarana desa berupa jalan setapak dan sarana prasarana air bersih menjadi prioritas utama dan perlu mendapat perhatian serius dan penanganan segera dari pemerintah. Kemudian dari sejumlah tanggapan responden mengenai prioritas permasalahan yang dianggap paling mendesak dan memerlukan penanganan segera dilihat dari skala prioritas terdapat variasi tanggapan responden yang menunjukkan beragam prioritas namun berdasarkan urutan prioritas dapat dilihat tanggapan responden menunjukkan sarana prasarana desa yang kurang memadai pada prioritas pertama dengan jumlah skor 80 kemudian pada skala prioritas kedua yakni jalan pedesaan atau jalan tani merupakan prioritas kedua dengan jumlah skor 51 dan masalah sarana air bersih dengan jumlah skor 48 berada pada masalah yang ditempatkan pada prioritas ketiga.

Dari sejumlah tanggapan responden mengenai prioritas masalah pembangunan desa dilihat dari skala prioritas terdapat variasi tanggapan responden yang menunjukkan beragam prioritas namun dari hasil skor-ing masalah pembangunan menunjukkan pembangunan jalan pedesaan berada pada prioritas pertama dengan jumlah skor 87 kemudian pada skala prioritas kedua yakni jalan tani dengan jumlah skor 76 dan sarana air bersih dengan jumlah skor 47 berada pada skala prioritas ketiga.

Prioritas masalah permasalahan dalam program penyelenggaraan pemerintahan yang dianggap perlu mendapat perhatian dilihat dari skala prioritas terdapat beragam prioritas salahsatunya adalah belum adanya

informasi desa dengan jumlah skor 33 merupakan skala prioritas pertama kemudian pada skala prioritas kedua yakni penetapan batas desa jumlah skor 27 dan pendataan desa yang belum baik dengan jumlah skor 22 berada pada skala prioritas ketiga penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan segera dari pemerintah adalah informasi desa agar masyarakat dapat mengetahui penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sarana prasarana olahraga menjadi prioritas dalam pembinaan masyarakat desa yang perlu mendapat perhatian dan penanganan segera hal ini memiliki kesesuaian berdasarkan hasil wawancara dan tanggapan responden menjadi prioritas pertama dan kedua dalam hal pembinaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa program pemberdayaan kemasyarakatan yang dianggap perlu mendapat perhatian dilihat dari skala prioritas berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara memberikan pemahaman bahwa dalam aspek pemberdayaan diperlukan pelatihan keterampilan khususnya teknik pertanian bagi masyarakat desa dikecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

Pelaksanaan Isu-isu Strategis

Berdasarkan tanggapan responden mengenai pelaksanaan pembangunan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat diketahui pada tabel 1.1. bahwa dimensi aktual memiliki skor 2,14 yang termasuk kategori sedang demikian hal dengan dimensi urgensi memiliki nilai skor yang sama yaitu

2,10. Pada dimensi kesesuaian memiliki skor 2,05 dan dimensi dampak positif memiliki skor 2,20 yang juga tergolong sedang sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan isu-isu strategis dalam pembangunan desa di Kecamatan Pitumpanua ditinjau dari 4 dimensi yaitu aktual, urgensi, kesesuaian dan dampak positif berjalan belum optimal dengan rata-rata skor 2,12 yang tergolong rendah.

Penelitian ini menunjukkan indentifikasi isu-isu strategis yang muncul dari RPJMDesa dan musrenbang serta indentifikasi prioritas isu dari masyarakat dimana isu-isu strategis yang muncul dalam RPJMDesa yakni persoalan infrastruktur Desa, sarana pendidikan dan kesehatan, sarana kemasyarakatan masih menjadi isu yang juga perlu mendapat perhatian serta keamanan desa masih perlu diperhatikan. Demikian halnya isu-isu strategis dalam musrenbang lebih banyak memunculkan isu-isu terkait peningkatan sarana transportasi, kebutuhan air untuk petani, peningkatan sarana Pendidikan, kesehatan dan produksi pertanian dan indentifikasi prioritas isu dari masyarakat menunjukkan yaitu sarana prasarana desa yang kurang memadai khususnya pembangunan jalan pedesaan, dari penyelenggaraan pemerintahan memerlukan penanganan dari informasi desa, pembinaan memerlukan sarana prasarana olahraga dan pemberdayaan dalam hal pelatihan keterampilan bagi masyarakat desa.

Kemudian penelitian ini juga menunjukkan analisis pelaksanaan isu-isu strategis dari tinjauan dimensi yaitu actual, urgensi, kesesuaian dan dampak positif diperoleh pemahaman bahwa isu yang masih belum dapat berjalan dengan baik yaitu informasi desa dan evaluasi desa dilihat dari keseluruhan keseluruhan dimensi dari aspek program penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan dengan baik kecuali dimensi dampak positif yang programnya terlaksana cukup baik. Dari aspek program pembangunan desa masih terlihat

bahwa infrastruktur kesehatan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dari segi urgensinya pendidikan kesehatan dan pembangunan ekonomi merupakan isu yang memiliki urgensi, demikian hal pembinaan masyarakat belum dapat memberikan dampak positif dan memiliki urgensi dan pemberdayaan masyarakat menempatkan pemberdayaan dalam bidang usaha sebagai isu yang actual dan memiliki urgensi. Jika dilihat secara konseptual bahwa isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah / masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai kondisi/kejadian penting/ keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan (Saleh, 2015).

Melihat dari dari kacamata konsep isu-isu strategis tersebut maka kondisi yang dianggap penting dan urgen yaitu terkait dengan sarana prasarana desa yang kurang memadai khususnya pembangunan jalan pedesaan, dari penyelenggaraan pemerintahan memerlukan penanganan dari segi program informasi desa yang perlu mendapat perhatian, untuk program pembinaan memerlukan sarana prasarana olahraga dan juga pada aspek pemberdayaan dalam hal ini pelatihan keterampilan bagi masyarakat desa terutama keterampilan usaha perlu ditingkatkan.

Kondisi ini secara actual muncul dari respon masyarakat terkait isu yang menjadi prioritas berdasarkan permasalahan yang dianggap paling mendesak dan memerlukan penanganan segera menunjukkan sarana prasarana desa yang kurang memadai pada prioritas pertama, kemudian pada skala prioritas kedua yakni jalan pedesaan, dan masalah sekolah Desa berada pada skala prioritas ketiga. Penegasan bahwa sarana prasarana desa yang kurang memadai menjadi prioritas tercermin dalam RPJM Desa dimana tiga

Desa Tellesang, Lawua, dan Tanrongi memprioritaskan pembangunan jalan Desa dari segi pembangunan. Isu yang berkembang juga terdapat pada musrenbang di Kecamatan Pitumpanua dimana prioritas lebih banyak pada pembangunan fisik yakni peningkatan sarana transportasi, kebutuhan air petani, peningkatan sarana Pendidikan, sarana kesehatan dan produksi pertanian. Bryson (2004) menyatakan bahwa isu-isu strategis yang demikian memerlukan beberapa resolusi untuk melakukan tindakan terbaik untuk mencapai misi lembaga. Hal ini yang menjadikan isu yang muncul dalam RPJM Desa dan Musrenbang di Kecamatan Pitumpanua lebih banyak pada pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana desa karena kondisi tersebut memang bersumber dari masyarakat yang memiliki kesesuaian dengan respon masyarakat terkait prioritas dalam pembangunan desa di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

Sementara dilihat dari pelaksanaan isu strategis perlu dioptimalkan terutama dalam hal program pembangunan infrastruktur desa secara actual belum berjalan berjalan dengan baik, diikuti dengan informasi desa yang belum berjalan dengan baik hampir merata keseluruhan dimensi hal ini terjadi pula pada aspek pembinaan masyarakat seperti pembinaan melalui olahraga, kesenian dan kebudayaan masih belum terlaksana secara actual serta belum memberikan dampak positif terhadap masyarakat demikian halnya dengan pemberdayaan masyarakat peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok usaha/masyarakat masih sangat kurang merupakan isu actual yang terjadi saat ini disertai dengan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan usaha pertanian, perikanan, dan perdagangan merupakan hal yang urgen disertai dengan pelaksanaan program yang dianggap belum memberikan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat akan pelatihan usaha masyarakat desa di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

Isu-isu strategis yang digambarkan dalam penelitian ini diidentifikasi melalui sejumlah penelusuran dokumen yang berkaitan dengan RPJM Desa dan dokumen Musrenbang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo sebagai representasi dari sumber sekunder berupa isu-isu yang berkembang menuju pelaksanaan program yang akan direalisasikan oleh penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal pembangunan desa. Identifikasi isu-isu strategis pembangunan desa tidak terbatas pada sumber sekunder tersebut tetapi menitikberatkan pada hasil dari respon masyarakat desa kecamatan pitumpanua Kabupaten Wajo terkhusus untuk 5 Desa (Lauwa, Lompo Bulo, Kaluku, Telessang, dan Tanrongi) yang berada Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo memberikan gambaran sesungguhnya mengenai isu-isu pembangunan desa yang diperlukan dan dirasakan mendesak oleh masyarakat desa.

Hal ini yang membedakan dari hasil identifikasi isu-isu strategis peneliti terdahulu seperti Pujiastuti (2001) melakukan pendekatan analisis SWOT dengan melihat peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi yang disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan organisasi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perbedaan pendekatan yang dilakukan menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaruan terutama terkait dengan pendekatan yang dilakukan lebih banyak terilhami dari pandangan isu-isu strategis Bryson (2004) yang secara implisit dalam penelitian ini menitikberatkan pada pendekatan langsung (the direct approach) dan pendekatan sasaran (the goals approach).

Pendekatan langsung (the direct approach) dapat diperhatikan pada hasil identifikasi isu-isu strategis pembangunan desa di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten wajo yang ditelusuri melalui respon masyarakat secara terbuka mengenai program yang dianggap perlu dan mendesak meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahann desa, pem-

angunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan menunjukkan isu-isu strategis seperti sarana prasarana desa yang kurang memadai khususnya pembangunan jalan pedesaan, dari aspek penyelenggaraan pemerintahan memerlukan penanganan dari segi informasi desa, dari aspek pembinaan memerlukan sarana prasarana olahraga dan pemberdayaan memerlukan pelatihan keterampilan bagi masyarakat desa.

Selanjutnya pendekatan sasaran (the goals approach) tergambar melalui hasil penelusuran tentang pelaksanaan program pembangunan desa yang dilakukan secara menyeluruh meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan rujukan program sebagaimana yang ditertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan desa sehingga diperoleh deskripsi secara spesifik mengenai program yang berjalan di lingkup pemerintahan desa di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

Hal ini kemudian dijadikan temuan yang menggambarkan isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian pemerintah khususnya program terkait pembangunan sarana prasarana kesehatan, pembinaan kemasyarakatan yang belum memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat demikian halnya dengan informasi desa dan evaluasi desa masih berjalan kurang baik selain itu juga terdapat pelaksanaan program yang berjalan dengan baik seperti optimalisasi pendamping desa yang memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Isu-isu starategis yang teridentifikasi dari RPJMDesa dan musrenbang yaitu terkait infrastruktur Desa, sarana pendidikan dan kesehatan, sarana kemasyarakatan sarana transportasi, kebutuhan air untuk petani,

peningkatan sarana Pendidikan, kesehatan dan produksi pertanian sementara isu-isu strategis yang teridentifikasi dari prioritas isu yang bersumber dari masyarakat menunjukkan sarana prasarana desa yang kurang memadai khususnya pembangunan jalan pedesaan, dari penyelenggaraan pemerintahan memerlukan penanganan informasi desa, pembinaan memerlukan sarana prasarana olahraga dan pemberdayaan memerlukan pelatihan keterampilan bagi masyarakat desa sebagai prioritas. Pelaksanaan isu-isu strategis dilihat dari dimensi actual, urgensi, kesesuaian, dan dampak positif belum berjalan optimal secara keseluruhan. Kemudian dari penelitian ini disarankan perlunya perhatian yang lebih oleh pemerintah daerah dalam merumuskan kegiatan yang lebih optimal dalam menjawab prioritas kebutuhan masyarakat tersebut. Perlunya pelibatan segala unsur pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama mengawal isu-isu strategis yang memiliki urgensi dan penting untuk menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. A. (2014). *Strategi Perencanaan Partisipatif Musrenbang Kota Makassar*. Makassar: Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Bryson, J. M. (2004). *Strategic planning for public and nonprofit organizations*. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Pristiyanto, D.. (2015). *Buku I Panduan Pembangunan Desa (Panduan Penyusunan RPJM Desa)*. Jakarta: Yayasan Penabulu.
- Pujiastuti, N. (2001). *Analisis Isu-Isu Strategis Tentang Kemampuan Pemerintah Kabupaten Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi kasus di Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur)*. Yogyakarta: UGM.
- Saleh, H. A. (2015). *Perencanaan Pembangunan Nasional Isu –isu Strategis . Bahan Ajar Mata Kuliah*. Makassar: FISIP, Universitas Hasanuddin.
- Sugiyono. (2011). *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarno, S. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Sunarti, E. (2012). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Supadmi, U. S. A. (2013). *Pelaksanaan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau*. Pontianak : Tanjung Pura
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah